

**ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI
KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DANA DESA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Panggung,
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

ABDUL MANAN

NPM. 1651030013

Jurusan : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

**ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI
KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DANA DESA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Panggung,
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh
ABDUL MANAN
NPM. 1651030013
Jurusan : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Nurlaili, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

ABSTRAK

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan akuntabel akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik transparan juga, sehingga kedua unsur elemen ini sangat penting dalam pengelolaan dana, baik dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa. Berdasarkan data *indosian corruption watch* selama tahun 2015-2018 terdapat 252 kasus yang melibatkan 214 kepala desa, dan data ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis pedoman akuntansi desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa di pekon srimenganten kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang akuntabilitas dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pedoman akuntansi desa pedoman akuntansi desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa di pekon srimenganten kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman akuntansi desa yang diterapkan oleh Pekon Srimenganten telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Pekon Srimenganten. Tetapi pedoman tidak akan terlaksana jika perangkat pekon tidak paham terlebih dahulu dengan pedoman yang ada. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di Pekon Srimenganten berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat pekon sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh permendagri dan perangkat pekon telah melaksanakan tugasnya pada bidang masing-masing, semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan Baliho/Banner Infomasi. Baliho /Banner Informasi ini akan dipasang di depan Balai Pekon. Harapannya agar semua warga bisa mengetahui kemana saja dana itu dialokasikan. Ekonomi islam memiliki nilai-nilai dasar yaitu Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi pada kebenaran, pertanggungjawaban, dan Tafakul (jaminan sosial)

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi , Korupsi, dan Pedoman Akuntansi Desa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Manan
NPM : 1651030013
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekon Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penyusun

Abdul Manan
NPM: 1651030013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI
AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DANA DESA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pekon
Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung,
Kabupaten Tanggamus)**

Nama

: Abdul Manan

NPM

: 1651030013

Program Studi

: Akuntansi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Nurlaili, S.Ag., M.A.

Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.

NIP. 197710152005012003

Mengetahui

Ketua Prodi Akuntansi Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak.

NIP. 19830815200604004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar bandar Lampung (0721) 7032600

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh **Abdul Manan, NPM. 1651030013**, Jurusan Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Any Eliza, S.E., M.Ak

Sekretaris : Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.Ak., Akt

Penguji I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.S.Ak

Penguji II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Pranslan Abdul Ghafur, M.Si.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

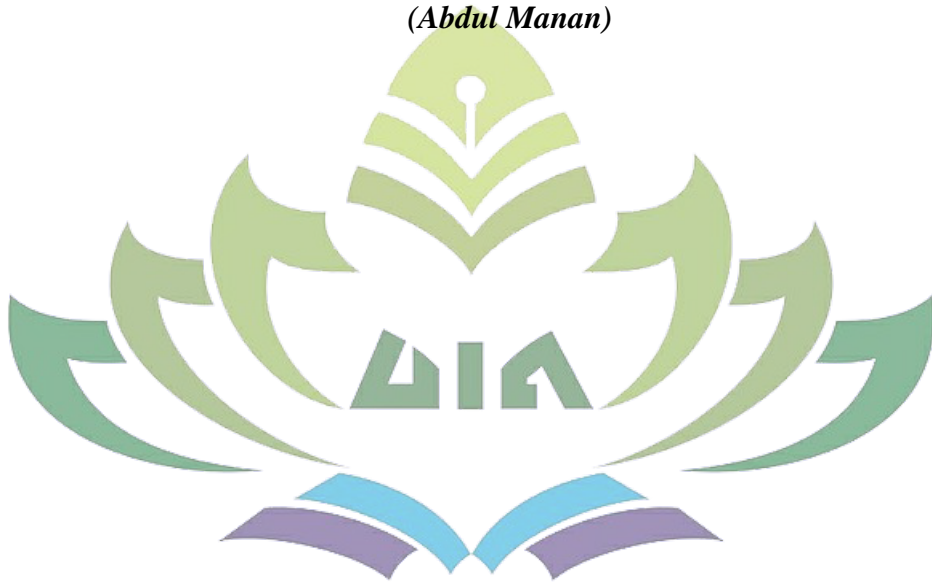
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?

(Q.S Al-Qiyamah : 36)

Kerja Ikhlas, Hati Puas, Hasil Tak terbatas

(Abdul Manan)



PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrokhiiim...

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. aku persembahkan sebuah karya tulis ini sebagai salah satu wujud dari rasa cinta dan kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sutomo dan ibunda tercinta Karsini yang selalu mengasihi, nmenyayangi dengan penuh ketulusan, selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan baik. Guru terbaikku sepanjang masa, terimakasih atas kepercayaan dan cinta kasih yang kau wujudkan dalam pengorbananmu selama ini. Semoga karya ini, dapat menjadi sebab tangis harumu atas pencapaian anakmu.
2. Kakakku tercinta Muhammad Istadi dan Lastri Alisya yang selalu menjadi tempat bercurah diri setelah ayah ibu dan menjadi salah satu alasan kuatku untuk menyelesaikan studi ini.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Abdul Manan dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 09 Februari 1998 dari rahim seorang ibu bernama Karsini dan ayah bernama Sutomo. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah :

1. SDN Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, lulus pada tahun 2010.
2. MTs Darul Hijrah Walfallah Tenggara Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, lulus pada tahun 2013.
3. SMAN 1 Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Semasa studi, penulis pernah aktif di beberapa organisasi maupun komunitas antara lain: UKM-F RISEF FEBI sebagai kepala divisi Kaderisasi, MIC Lampung sebagai anggota divisi HCM.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekon Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi Akuntansi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2 dan 3 yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Any Eliza.,S.E.,M.Ak selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Nurlaili, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Agus Kurniawan.,S.E.,M.S.Ak selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Bapak dan ibu dosen serta staff Program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak Jeje, S.Pd selaku Pj Kepala Pekon, dan seluruh jajaran perangkat Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pekon Srimenganten.
7. Keluarga UPT Karir Kewirausahaan UIN Raden Intan Lampung, Bunda Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., serta seluruh staff jajarannya.
8. Keluarga Pondok Pesantren Mutiara Miftahul Jannah, Ustad Herman Edi Abdullah, Umi Sumarni, Uni Ira, Umi Nur, Umi Hartini, Umi Nisa, dan Abi Kurniawan yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi Syariah A angkatan 2016, Abdul Munir, Ahmad Jian Sastra Ramadhan, Aiman Yadi, Endri Wibowo, Muhammad Parid Zaki, Dina Pratiwi, Dwi Windanarti, Destri Anggraini, Della Ayu Safitri, Evita Veron, Riami Amini Aru, Lusiyan, Sinta tristia Hangayumi.
10. Teman-teman seperjuangan Al-Faruq, Mahad Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016
11. Ayuk Siti Kaulifah Andarwati S.E, yang selalu mensupport agar selalu tegak lurus berjuang dalam menyelesaikan studi.

12. Sahabat Medan Magnet Abang Dicky Irwansyah Kaban, S.E, kak Abdurahman Muas Al Ghifari, S.E, Fajar Maulana,S.E, Titin Yuniarti, S.E, Rika Fitri Yeni,S.E, dan Yunda Romida, S.E yang selalu memberikan dorongan, semangat, cerita dan berbagi keceriaan guna mensukseskan cita-cita.
13. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 164, Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
14. Teman-teman seperjuangan di UKM-F RISEF yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis,

Abdul Manan
NPM.1651030013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Fokus Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Agensi	26
B. Teori Stewardship.....	27
C. Desa dan Pemerintah Desa	28
D. Pedoman Akuntansi Desa.....	35
E. Akuntansi Keuangan	41
F. Akuntansi Sektor Publik.....	42
G. Akuntansi Desa	44

H. Akuntabilitas	45
I. Transparansi	49
J. Penelitian Terdahulu	53
K. Kerangka Pikir.....	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Sejarah Pekon Srimenganten.....	65
2. Sejarah Pembangunan Pekon	67
3. Kondisi Geografis Dan Demografis Pekon Srimenganten.....	68
4. Kondisi Sosial, Ekonomi Pekon Srimenganten.....	69
5. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Srimenganten	73
B. Pedoman Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa.....	73
1. Pedoman Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa	73
2. Pedoman Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dana Desa	80

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Pedoman Akuntansi Desadalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Pekon Srimenganten	101
B. Penerapan Pedoman Akuntansi Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Pekon Srimenganten Dalam Prespektif Ekonomi Islam	121

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korupsi Kepala Desa	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3.1 Sejarah Pembangunan Pekon	67
Tabel 3.2 Kondisi Geografis Pekon Srimenganten	68
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Pekon Srimenganten	70
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon srimenganten.....	70
Tabel 3.5 Mata Pencarian Penduduk Pekon Srimenganten	71
Tabel 3.6 Pemilikan Hewan Ternak Penduduk Pekon Srimenganten.....	72
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Pekon Srimenganten	72
Tabel 3.8 Data wawancara	73
Tabel 4.1 Buku Kas Umum Pemerintah Pekon Srimenganten	102
Tabel 4.2 Buku Pembantu Bank Pemerintah Pekon Srimenganten	103
Tabel 4.3 Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Pekon Srimenganten	104
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes	108
Tabel 4.2 Laporan Kekayaan Milik Desa	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	63
Gambar 3.1 Sruktur Organisasi Pemerintah Pekon Srimenganten	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD dan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD)

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi **“Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekon Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus) ”**Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. **Analisis** adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pedoman yang dipakai oleh desa terhadap transparansi dan akuntabilitas dana didesa.
2. **Penerapan** adalah perbuatan menerapkan, dan menurut beberapa ahli menyebutkan, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu

¹ Zaenal Arifin dan Amran Tasai, *Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi*(Jakarta: Akademika Presindo, 2006), h.32.

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. **Pedoman** adalah hal pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.² Pedoman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI KASP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. **Asistensi Akuntansi Keuangan Desa** adalah Panduan Pencatatan proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.³ Akuntansi desa ialah proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
5. **Akuntabilitas** mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya.⁴ Akuntabilitas

²Ibid

³<http://www.keuangandes.com/2017/04/akuntansi-desa-keuangan-desa-dan-pengelolaan-keuangan-desa/>, diakses pada 24.01, rabu, 13 Desember 2019

⁴ibid

disini bagaimana pihak perangkat desa mampu mempertanggung jawabkan hasil keuangan tahunan yang ada di desa, sesuai antara realisasi yang terjadi di lapangan dengan laporan keuangan yang telah dibuat.

6. **Transparansi** adalah suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu.⁵ Transparansi disini ialah sebagaimana terbukanya perangkat desa terhadap masyarakat desa dalam melakukan keterbukaan data laporan keuangan tahunan desa.
7. **Dana Desa** Adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶ Dana desa disini ialah dana desa yang diperoleh melalui APBN dan APBD untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di desa.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi yang dipilih, maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana

⁵ Dedy Aries Poae David P. E. Saerang, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013, h 30.

⁶ Buku Saku Dana Desa, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, November 2017, h 7.

desa dalam perspektif ekonomi islam (studi pada pekan srimenganten di kecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus), guna meratanya pembangunan desa untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal. Dari tercapainya pemerataan dana desa secara akuntabilitas dan transparansi diharapkan pembangunan dapat dirasakan dan berdampak pada kemajuan pemerataan ekonomi, dalam perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Penulis tertarik akan pelaporan keuangan desa dimana setiap pelaporan memiliki sebuah pedoman sebagai acuan dan rujukan untuk mendapatkan sebuah laporan keuangan yang baik, tentunya akuntabilitas dan transparansi. Dengan sebuah pelaporan yang baik dan realisasi yang sama dengan laporan keuangan maka kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat akan tersampaikan, dan efeknya ialah mulai meratanya pembangunan baik infrastruktur maupun masyarakatnya untuk menunjang ekonomi di desa. Desa merupakan tatanan pemerintahan yang terakhir. Dimana setiap desa di kecamatan pulau panggung memperoleh APBN yang sama rata senilai 900 juta-1 Miliar per tahun, namun dengan dana tersebut tidak banyak desa yang mampu mengelolanya dengan baik, baik realisasinya, maupun keterbukaan dengan warga masyarakatnya sendiri yang akhirnya tindakan kecurangan akan muncul jika tidak adanya pengawasan yang baik dari pihak BPD/BHP maupun masyarakat.

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan akuntabel akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik transparan juga, sehingga kedua unsur elemen ini sangat penting dalam pengelolaan dana, baik dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa. Kinerja sebuah desa akan terlihat jika pemerintah desa mampu membuktikan realisasi dana desa dengan bukti nyata yang terjadi dilapangan maupun dengan laporan keuangannya.

2. Alasan Subjektif

Peneliti ingin melihat tingkat akuntabilitas dan transparansi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa melalui pedoman akuntansi desa ini. Dan Pembahasan pedoman akuntansi desa masih relatif sedikit yang meneliti dan membahasnya, dari sinilah peneliti tertarik untuk meneiliti dan melihat seberapa pengaruhnya Penerapan Pedoman Akuntansi Desa ini terhadap Akuntabilitas dan Transparansi dana desa yang dikelola dan dialokasikan oleh sebuah desa.

C. Latar Belakang Masalah

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dikepalai oleh Kepala Desa melalui pemilihan rakyat secara langsung yakni pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Kepala desa menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan boleh menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁸ Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan “Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Perangkat desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing masing, antara lain: sekretaris desa, bendahara desa, Kasi pemerintahan, Kasi pembangunan, Kasi Pelayanan, Kaur keuangan, hingga elemen terkecil yakni kepala urusan kesejahteraan rakyat dan Kadus (Kepala Dusun), dan ketua rumah tangga (RT).

Pemerintah desa berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan

⁷Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, BAB I, pasal 1 ayat 43, h 7, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2014, tentang desa BAB I, pasal 1 ayat 1

⁸Ibid, h. 23

operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB VIII keuangan desa dan aset desa, pasal 72 ayat 4 Tentang Desa, “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.⁹

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.¹⁰ Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan pemerintah no.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no.6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa yang bersumber dari APBN terdapat pada peraturan pemerintah no.60 tahun 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014. Peraturan Mendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan arah penyempurnaan atas

⁹Ibid h.40

¹⁰Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, 2015, h 48

peraturan Mendagro no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi APBDesa yang telah diperbaharui, dan peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 kembali di revisi menjadi peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa¹¹ yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Keenam prinsip tersebut ditujukan agar pengelolaan dana desa mampu diserap dengan baik dan terealisasi dengan baik untuk masyarakat desa itu sendiri, bukan untuk masyarakat desa lain. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan dana desa tidak hanya prinsip saja, namun terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa pula yang harus ditaati. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Al-qur'an disebutkan surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”* (Al – Baqarah : 282)¹²

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 37 Tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan desa, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

¹² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), h 37

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat (كَتَبَ) dalam ayat tersebut, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi.

Dalam Ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan hutang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi. Disurah lain Allah menyebutkan Prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan dalil al-qur'an. Dalam Al- Qur'an diperintah kepada manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan berlaku adil. Seperti firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar Maha melihat”*¹³. (Q.S AN-Nisa: 58)

Sebagai seorang pemimpin sebuah amanat yang telah ia terima harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ayat ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan

¹³ Ibid, 4:58

posisinya, memberikan rincian laporan keuangan dengan sebaik-baiknya dan adil terhadap masyarakatnya yang ia pimpinnya, agar menjadikan kepemimpinannya sesuai yang diinginkan rakyatnya dan dicintai oleh masyarakatnya dan menjadikan kemandirian didesanya.

Pada tahun 2015 Pemerintah Pusat mulai menyalurkan dana desa dengan disetujuinya anggaran dana desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp20,7 Triliun dalam APBN 2015 yang disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp46,9 Triliun yang disalurkan ke 74.754 desa dan untuk tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun disalurkan ke 74.954 desa, peningkatan jumlah desa terjadi karena bertambahnya jumlah desa akibat dari pemekaran wilayah. Dana Desa Untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan pasal 14 PMK No. 247 Tahun 2015 disalurkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 disalurkan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%. Namun menteri keuangan menerbitkan PMK 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa mengubah cara-cara dan mekanisme pencairan dana desa 2018 menjadi 3 tahap skema baru, yaitu tahap I 20%, tahap II 40%, dan

tahap III 40%. Hal ini berbeda dengan tahapan seperti biasanya yang hanya II tahap.¹⁴

Namun dari besarnya dana yang dikucurkan ternyata menimbulkan permasalahan baru, Berdasarkan data dari *Indosian Corruption Watch* (ICW) selama tahun 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi yang melibatkan 214 kepala desa selama periode tersebut. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Korupsi Kepala Desa

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	15 Kepala Desa
2	2016	61 Kepala Desa
3	2017	66 Kepala Desa
4	2018	89 Kepala Desa

Sumber informasi : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, Indonesia Corruption Watch

Data diatas selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya, dikarenakan bertambahnya desa baru dan tentunya bertambah pula kepala desanya. Kasus yang sering terjadi di desa ialah penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap, kerugian yang dialami mencapai Rp. 107,7 miliar. Dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia menanggalkan sebuah kekhawatiran dimana desa merupakan elemen paling bawah untuk menompang kemajuan Indonesia.

Kasus korupsi di provinsi lampung meningkat semenjak Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh

¹⁴ <https://www.jogloabang.com/desa/tahapan-pencairan-dana-desa-2018-dalam-permenkeu-pmk-225pmk072017> Diakses pada tanggal 5 November 2019

beberapa bupati di Kabupaten Provinsi Lampung, yang pertama ialah Bupati Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016, Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018, dan diringi kembali oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018, lalu menyusul Bupati Kabupaten Mesuji pada tahun 2019, dan yang terakhir terjerat kasus korupsi adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019.

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi yang mendapat pantauan oleh KPK. saat Kepala Daerah tertangkap maka kasus korupsi pun akan merambah hingga pemerintahan desa/pekon, kasus yang pertama ialah korupsi APBDes oleh mantan kepala pekon Dusun Kayu Ubi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, anggaran tahun 2016 yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp.101 juta lebih. Mantan kepala pekon ini terbukti telah mencairkan dan menyalurkan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah, seperti tidak melibatkan bendahara keuangan pekon dalam hal pencairan.¹⁵

Kasus serupapun terjadi dipekon sukapadang, Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus, oknumnya ialah Kepala Desa/Kepala Pekon yang melakukan tindak pidana korupsi pemerintah provinsi tahun 2018 sebesar Rp.250.000.000.-, dan tak hanya korupsi dana Pemerintah Provinsi

¹⁵ Jamhari Ismanto, Korupsi, Mantan Kepala Pekon di Tanggamus Divonis 3 Tahun Penjara, WARTA9.COM, diunduh pada tanggal 6 januari 2020

saja, Kepala Desa/Kepala Pekon ini pun menilap uang pembangunan masjid sebesar Rp. 15.000.000.-.¹⁶

Kemudian dibalik adanya tidak pidana korupsi diberbagai pekon di kabupaten Tanggamus, pekon srimenganten sebagai pekon/desa yang dipilih oleh peneliti sebagai studi penelitiannya ternyata, pada tahun 2015 mendapatkan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 320.630.885,62, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 699.212.020,00, pada tahun 2017 pekon srimenganten kembali mendapatkan APBD sebesar Rp. 1.091.393.903,36, dan pada tahun 2018 srimenganten mendapatkan APBD meningkat kembali menjadi Rp. 1.255.992.036,00.

Berdasarkan uraian diatas mengenai banyaknya kasus korupsi yang melibatkan oknum, tak terkecuali merambah kepada pemerintahan desa dan adanya peningkatan dana pencairan APBD yang diperoleh pekon srimenganten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam prespektif ekonomi islam (studi pada pekon Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Kupas tuntas.co, korupsi dana desa Rp.500 juta, oknum kepala pekon jadi tersangka, terancam 20 tahun penjara, diakses pada 23 Desember 2019

1. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa?
2. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam perspektif ekonomi islam?

E. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya fokus penelitian.

1. Subjek dari penelitian ini adalah sampel perangkatpekon dan masyarakat di Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
2. Penelitian ini menganalisa penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa.
3. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa yang berfokus kepada penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dalam prespektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain :

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pedoman asistensi

akuntansi keuangan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan untuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, dan menambah pengetahuan mengenai pedoman akuntansi desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam membuat kebijakan terkait penciptaan pedoman akuntansi desa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola fikir yang dinamis kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- 2) Bagi perangkat desa penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pencatatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- 3) Bagi perkembangan akuntansi syariah, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perluasan materi ajar dalam akuntansi syariah yang dalam prakteknya sering didapati diterapkan dalam perbankan saja. Lewat penelitian ini diharapkan akuntansi syariah juga dapat berkembang dalam ranah akuntansi dalam pemerintahan, sehingga dalam Pemerintah dapat diisi oleh para akuntan syariah agar terciptanya pengelolaan uang negara yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.
- 4) Sebagaimana pada harapan kontribusi bagi perkembangan akuntansi syariah, dengan masuknya para akuntan syariah kedalam pemerintahan akan dapat memberikan perubahan dalam pengelolaan uang negara yang amanah dan berkeadilan. Sehingga akan meningkatkan perekonomian Negara menjadi lebih baik lagi. Dengan cangkupan yang semakin luas dalam akuntansi syariah dapat meningkatkan pengaruh ekonomi Islam dalam memperbaiki ekonomi ummat.
- 5) Bagi pemberi kebijakan diharapkan menjadi pertimbangan agar semakin baik dalam melakukan pelatihan maupun pengawasan terhadap pedoman akuntansi desa dan dana desa.
- 6) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu dan sebagainya).¹⁸ Jadi metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

- 1) Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.1

¹⁸ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h.1

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2

²⁰ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandaraju, 2012), h. 185.

penelitian yaitu Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

- 2) *Library Research* : Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.²¹ Yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring ke dalam kerangka pemikiran teoritis. *Library Research* dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur, seperti buku tentang akuntansi desa, akuntansi syariah, pedoman akuntansi desa, buku pintar dana desa, undang-undang, Al-Quran dan hadist serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu: penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap terhadap suatu yang diteliti. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mardalis, bahwa penelitian deskriptif adalah

²¹Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta,2012), h. 398.

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²² Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian sifat penelitian yang penulis lakukan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimanapedoman akuntansi desa yang akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara, dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda situs ataupun manusia yang langsung berkaitan dengan penelitian, data-data primer di dapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner, melakukan wawancara atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer pada penelitian ini di peroleh dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap pihak yang berkaitan dengan pedoman akuntansi desa(*key informan*). Peneliti menentukan siapa saja yang akan menjadi *key informan* penelitian. *key informan* dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam pencatatan laporan keuangan kepala pekon, bendahara desa, sekretaris desa, kasi dan kaur

²²Rony Kountur, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara 2005), h. 43.

pemerintahan, di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis koran atau majalah ataupun seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian.²³ Data berasal dari Pekon Srimenganten berupa dokumen-dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, dan Laporan kekayaan milik desa.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi memiliki tiga macam jenis yaitu, observasi partisipatif, terstruktur atau terencana, tak terstruktur. Menurut *Spadley* ada tiga tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi.²⁴ Peneliti melakukan

²³Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian: {Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), h.77-78

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.* h. 297.

observasi pada pengelolaan dana pekon srimenganten, kecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Adapun yang menjadi narasumber adalah perangkat pekon srimenganten Kecamatan pulau panggung Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, perasaan dan keyakinan dari responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁶ Dokumentasi dapat berupa dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan

²⁵ *Ibid*, h.316.

²⁶ Husain Husman, *Metodelogi Penelitian Sosial*(Jakarta : Bumiaksara, 1996), h. 6.

keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan Perangkat Pekon di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

4. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu peroses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis atau meragukan.²⁷ Dari berbagai data yang telah dikumpulkan peneliti akan meneliti kembali untuk mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian.

b. Sistematika Data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸ Data yang telah dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulis pedoman skripsi yang ada. Setelah selesai melakukan editing dan sistematika keseluruhan

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi reassert jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 89.

²⁸ *Ibid*, h. 126.

data akan diolah secara sistematis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu sesuai metode yang mempelajari gejala yang sifatnya umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang sifatnya khusus mengenai fenomena-fenomena atau gejala-gejala tertentu yang sedang diselidiki atau diamati secara seksama.²⁹ Maksud dari metode ini sesuatu cara menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri juga orang lain.

Menurut Nasution menyatakan bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.

²⁹*Ibid*, h. 42.

Menurut Bodgan Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan.³⁰

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti.³¹ Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan tanpa menggunakan teknik bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Desa dalam Mewujudkan Transaparansi dan Akuntabilitas Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekon Srimenganten diKecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus).

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2014), h.87.

³¹ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosada Karay,2011),

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Agensi

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat

berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.³²

B. Teori Stewardship

Teori lain yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari teori agensi yaitu *teori stewardship*, yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *teori stewardship* sehubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah karena Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola) *teori stewardship* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “*stewards/ penatalayanan*”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Implikasi *teori stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan

³²Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis, *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314, h. 32

tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).³³

C. Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.³⁴

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

³³ *Ibid*, h. 32-33

³⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h.1-2.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

R.H.Unang Soenardjo dalam buku Hanif Nurcholis menyebutkan, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.³⁶

Provinsi Lampung memiliki nama lain desa yaitu tiuh atau pekon, pekon disini sama dengan desa, namun masyarakat adat dilampung lebih mengenal pekon daripada desa. Menurut UUD RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan, Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 2.

³⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h.4.

terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakatnya sendiri yang diakui dan dihormati oleh peraturan perundang-undangan dan NKRI. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

³⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.7.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.³⁸

Kewenangan desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul ialah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa yang terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 12.

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan hak dan kewajiban desa, adapun hak-hak desa yaitu :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Disamping adanya sebuah hak, sebuah desa pun harus menuanikan kewajibannya, adapun kewajiban desa ialah :

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³⁹

Tujuan dari dibentuknya desa ialah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan memiliki keberhasilan untuk serta merta dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur dan masyarakat.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

³⁹*Ibid*, h. 36.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :⁴⁰

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Profesionalitas
- 7) Akuntabilitas
- 8) Efektivitas dan efisiensi
- 9) Kearifan lokal
- 10) Keberagaman
- 11) Partisipatif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁴¹ Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:⁴²

- 1) Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa/Kepala Pekon
- 2) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :

⁴⁰Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 2.

⁴¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 14.

⁴²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 73.

- a) Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretariat desa
- b) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
- c) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun, dan kepala rumah tangga.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan

akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepala BPD.⁴³

Dalam pandangan Islam, Pemerintah disebut juga dengan Ulil amri yang terdapat dalam Firman Allah *Subhaanahu Wata'ala* Q.S.An-Nisaa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S.An-Nisaa (4): 59)⁴⁴

D. Pedoman Akuntansi Desa

Pedoman Akuntansi yang digunakan ialah pedoman asistensi keuangan desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan sekaligus pengawasan.⁴⁵

1. Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

⁴³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 76.

⁴⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), h 69

⁴⁵ IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, (IAI-KASP : 2015), h. 2-5.

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- a. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

7. Indikator penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa

- a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).

- b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- e. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- f. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- g. Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.
- h. Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

E. Akuntansi Keuangan

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, hutang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).⁴⁶ Sedangkan menurut

⁴⁶Sofyan Harahap, teori Akuntansi, Jakarta, rajawali pers, h 3.

American institute of certified public accountant (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.⁴⁷

F. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntansi sektor Publik merupakan suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.⁴⁸ Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas :

- 1) Akuntansi sektor publik merupakan alat penyediaan informasi baik bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program penganggaran,

⁴⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, Cv Pustaka Setia, 2015, cetakan I, h 15

⁴⁸ Muindro Renyowijoyo (ed.3), *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non-Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 1-3.

evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Dan informasi bagi publik untuk mengetahui hasil pelaksanaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah.

- 2) Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan laba/rugi dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana dan neraca. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian manajemen bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk melakukan alokasi sumber daya, menentukan biaya pelayanan dan menentukan standar harga yang akan dibebankan kepada publik. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi dapat juga dipakai untuk menentukan indikasi kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, indikator kinerja dapat berupa finansial dan non-finansial.

- 3) Akuntansi sangat dibutuhkan untuk pembuatan laporan keuangan sebagai Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) manajemen berupa laporan surplus/defisit APBN pada pemerintah, laporan rugi/laba dan arus kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber daya dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan

tetapi juga akuntabilitas value for money, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas publik.

G. Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah :

- 1) Masyarakat Desa
- 2) Perangkat Desa
- 3) Pemerindah Daerah, Kabupaten/Kota maupun Provinsi
- 4) Pemerintah Pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh Pemerintahan Desa berupa :⁴⁹

- 1) Anggaran
- 2) Buku Kas
- 3) Buku Pajak
- 4) Buku bank
- 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Terdapat beberapa aspek-aspek dalam Akuntansi Desa :⁵⁰

- 1) Aspek Fungsi

⁴⁹ V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, h. 7.

⁵⁰ IAI, Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, (IAI-KASP : 2015), h. 6.

Akuntansi menyajikan informasi kepada pemerintahan Desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan menghasilkan keputusan bagi Kepala Desa yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2) Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data menjadi sebuah data yang relevan, kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

H. Akuntabilitas

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.⁵¹ Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)

⁵¹ Eni Dwi Susliyanti, Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017*

ialah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)

adalah pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik:

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (Accountability for probity and legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2) Akuntabilitas Proses (Proses accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- 3) Akuntabilitas Program (*Program accountability*), untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.⁵²

Dalam pandangan Islam, terdapat konsep amanah yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi dan di akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam Al-Quran terdapat dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36.

أَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)” (Al-Qiyamah (75) : 36)⁵³

Dalam ayat lain disebutkan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An Nahl (16) Ayat 90)⁵⁴

⁵² Muindro Renyowijoyo (ed.3), *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non-Laba*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h.1-3

⁵³ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), h 462

⁵⁴ *Ibid*, h 221

Ayat diatas Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan adalah / keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya. Sedang kebalikan dari keadilan adalah kedzhaliman. Dan tidak hanya itu dalam surat Al **Muthaffifin** ayat 1-

3 Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (Q.S Al-Muthaffifin (83) 1-3)⁵⁵

Ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam akuntansi syariah dilarang dalam berbuat curang. Kita mengenal beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang menyebabkan suatu perusahaan pailit, yang terkenal kasus enron. Termasuk praktek *earning management* dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk mendatang *mashlahah* dan menghindari *mudharat*.

Dari penjeasan diatas, ada beberapa Indikator Akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

⁵⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), h 470

- 2) Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
- 3) Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Alokasi Dana Desa.
- 4) Laporan keuangan pemerintah desa merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.
- 5) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara continue atau berkelanjutan.

I. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi, dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.⁵⁶

⁵⁶ Rosalina Ghozali, Darma Yanti, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan dan Desa Sukaraja)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang Kota

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Krina menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu:

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Lebih jauh lagi, transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.⁵⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁵⁸

Mardiasmo juga menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah desa, yaitu:

- 1) Hak untuk mengetahui (*right to know*) yaitu: mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan yang dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

⁵⁷Zulkifli Umar, Cut Fittika, Khairunnisa, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*, Jurnal Kolegial-vol.6, No.2, Desember 2018, h.138-139

⁵⁸Eni Dwi Susliyanti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta, Jurnal WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017, h.15*

- 2) Hak untuk diberi informasi (*right to informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
- 3) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to listened to*).

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Transparansi juga memiliki indikator dalam penilaiannya :

- 1) Pengumuman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan transparansi.
- 2) Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
- 3) Mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat.
- 4) Pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap waktu.
- 5) Pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan instrument keterbukaan pemerintah seluas-luasnya terhadap semua kebijakan maupun seluruh sumber daya publik kepada masyarakat. Tujuan keterbukaan ini adalah agar pemerintah desa memiliki integritas tinggi dalam segala kebijakannya.

J. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eni Dwi Susliyanti	Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul telah menerapkan prinsip partisipasif, terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sebesar 92%, Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul telah menerapkan prinsip partisipasif, transparan dan akuntabel, Pelaporan Alokasi Dana Desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat kecamatan yang dilakukan secara periodic, Berdasarkan hasil analisis efektifitas, Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo sangat efektif yaitu sebesar 100% selain itu ADD memberi kontribusi sebesar 55,62% dari total pendapatan yang diterima pemerintah Desa Trimulyo. ⁵⁹
2	Zulkifli Umar, Cut Fittika	Pengaruh Akuntabilitas Dan	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama

⁵⁹ Eni Dwi Susliyanti, Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017*

	Syawalina, dan Khairunnisa	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh		berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh. ⁶⁰
3	Rosalina Ghozali, Darma Yanti	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati,	Penelitian Deskriptif	Transparansi pemerintah desa dalam pelaporan alokasi dana desa pada 3 Desa di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yaitu kurang informasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa dan pengetahuan sebagian masyarakat yang masih rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi terperinci fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa. Sementara pada bidang pemberdayaan masyarakat

⁶⁰Zulkifli Umar, Cut Fittika, Khairunnisa, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*, Jurnal Kolegial-vol.6, No.2, Desember 2018

		Desa Kuripan dan Desa Sukaraja)		tidak dialokasikan ADD, sehingga dari 4 bidang anggaran ADD yang terealisasi sebesar 75%. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaporan alokasi dana desa pada 3 desa di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu perencanaan dikatakan telah terealisasi secara optimal, pelaksanaan program kegiatan masih dihadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang kurang memadai, laporan realisasi pengelolaan alokasi dana desa menurut sudah dilaporkan, penatausahaan telah dilakukan dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan ADD oleh Bendahara Desa, Kepala Desa telah melaporkan ADD kepada Bupati melalui Camat dimana terdapat sisa anggaran untuk Desa Gunung Jati dan Desa Sukaraja, sedangkan kekurangan anggaran ADD pada Desa Kuripan. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap ADD dengan bersedia diperiksa Bupati melalui Camat. ⁶¹
4	Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec.	Penelitian Kualitatif	Penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi

⁶¹Rosalina Ghazali, Darma Yanti, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan dan Desa Sukaraja)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang Kota Palembang, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiah (APPPTMA) ISBN: 978-623-90018-0-3, Medan, 30 November-03 Desember 2018

		Busungbiu, Kab. Buleleng)		<p>dijelaskan mekanisme penyaluran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur Alokasi Dana Desa, setelah dana masuk maka akan dilakukan perencanaan oleh desa yang melibatkan banyak pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi dana, kemudian untuk mempertanggungjawabkannya desa membuat laporan realisasi dan SPJ. Didalam pembuatan laporan realisasi banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan dana alokasi dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran</p>
--	--	------------------------------	--	--

				serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi. ⁶²
5	Inten Meutia, Liliana	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Deskripsi Kuantitatif Dan Kualitatif	<p>Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Berkenaan dengan aspek pengelolaan keuangan, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan telah mematuhi prinsip dasar pengelolaan</p>

⁶²Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

				<p>keuangan. Berkenaan dengan aspek penatausahaan secara umum hampir semua desa telah dapat menjalankan aspek penatausahaan dengan baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan komposisi belanja desa, semua desa yang diteliti tidak memenuhi komposisi belanja desa sesuai aturan 70% yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berbanding 30% dari total anggaran belanja desa dipergunakan bagi pendapatan dan tunjangan kades dan perangkatnya, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga tidak memberikan multiplier effect bagi masyarakat desa dalam pembangunan.⁶³</p>
6	Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Yeney Widya Prihatiningti	Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik	Kualitatif Dengan Model Analisis Interaktif	Pemerintah desa telah berkomitmen untuk menerapkan akuntabilitas keuangan baik secara vertikal maupun horizontal yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas vertikal telah

⁶³Inten Meutia, Liliana, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa" Universitas Sriwijaya, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2017

	as			dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) secara berkala. Sementara itu, akuntabilitas horizontal telah dilaporkan dalam forum musyawarah desa setiap akhir tahun secara lisan ataupun secara administrasi. Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan memasang banner rincian APBDes, papan informasi kegiatan dan publikasi program/kegiatan pada website. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terhadap pemerintah desa, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. ⁶⁴
7	Mustazir Ramli	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe	Kualitatif Dengan Model Analisis data interaktif	Mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong Harapan secara administrasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan gampong seperti laporan realisasi dan laporan akhir penggunaan APBG telah disampaikan secara tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas vertikal mereka kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kemudian secara horizontal, pertanggungjawaban keuangan disampaikan di dalam forum musyawarah yang melibatkan Tuha Peut dan masyarakat gampong, selain itu

⁶⁴Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Yeney Widya Prihatiningtias, "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik" Universitas Brawijaya, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10 Nomor 1, April 2019

				<p>pertanggungjawaban juga diumumkan pada papan informasi di kantor Keuchik. Kapasitas Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sangat bagus. Kinerja Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dapat baik karena didukung oleh kualitas SDM dan banyaknya pelatihan yang diikuti oleh aparatur gampong. Sementara itu, sosok Keuchik sebagai pimpinan dinilai sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan.⁶⁵</p>
8	Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, Yesi Muti	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis	Mixed Riset (Penelitian Campuran) Yaitu Sebuah Penelitian Yang Menggabungkan Dua Tipe Penelitian Yaitu Penelitian Kuantitatif Deskriptif Dan Kualitatif.	<p>Hasil Kuantitatif, Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika di rincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100%, Pelaksanaan 86.64%, Penatausahaan 100%, Pelaporan 100%, dan Pertanggung jawaban 100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Hasil Kualitatif, Tahap Perencanaan Tahap perencanaan pengelolaan keuangan secara konsep sudah melakukan prinsip partisipatif dan transparansi. Salah</p>

⁶⁵Mustazir Ramli, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe", Pemerintah Kota Lhokseumawe, Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1), April 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190



				<p>satu wujud adanya asas partisipatif ini adalah adanya MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam praktiknya telah melibatkan steakholder di Desa, Tahap Pelaksanaan Secara umum pada tahap pelaksanaan telah terlaksana dengan baik yang dalam hal ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, Pada tahap Pelaksanaan ini, maka salah satu tuntutan Pemerintah dan masyarakat adalah adanya Transparansi. Prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik, terbukti di setiap desa telah memasang Beleho berisikan rincian APB Desa, serta dalam proyek pembangunan juga di lengkapi dengan Papan Informasi kegiatan, Tahap Penatausahaan secara umum system penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan tuntutan permendagri 113 tahun 2014. Walaupun masi ada yang harus diperbaiki salah satunya adalah terkait registrasi penutupan kas. Adanya system penatausahaan yang baik akhirnya juga berdampak kepada pengelolaan keuangan yang baik, Tahap Pelaporan Dalam hal Pelaporan, setiap desa telah melakukan dengan baik, setiap desa telah memenuhi tuntutan dari peraturan. Khusus untuk dana yang bersumber dari Pusat (Dana Desa) maka ada laporan tersendiri, Tahap Pertanggungjawaban secara umum sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip</p>
--	--	--	--	--

				akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes. ⁶⁶
--	--	--	--	--

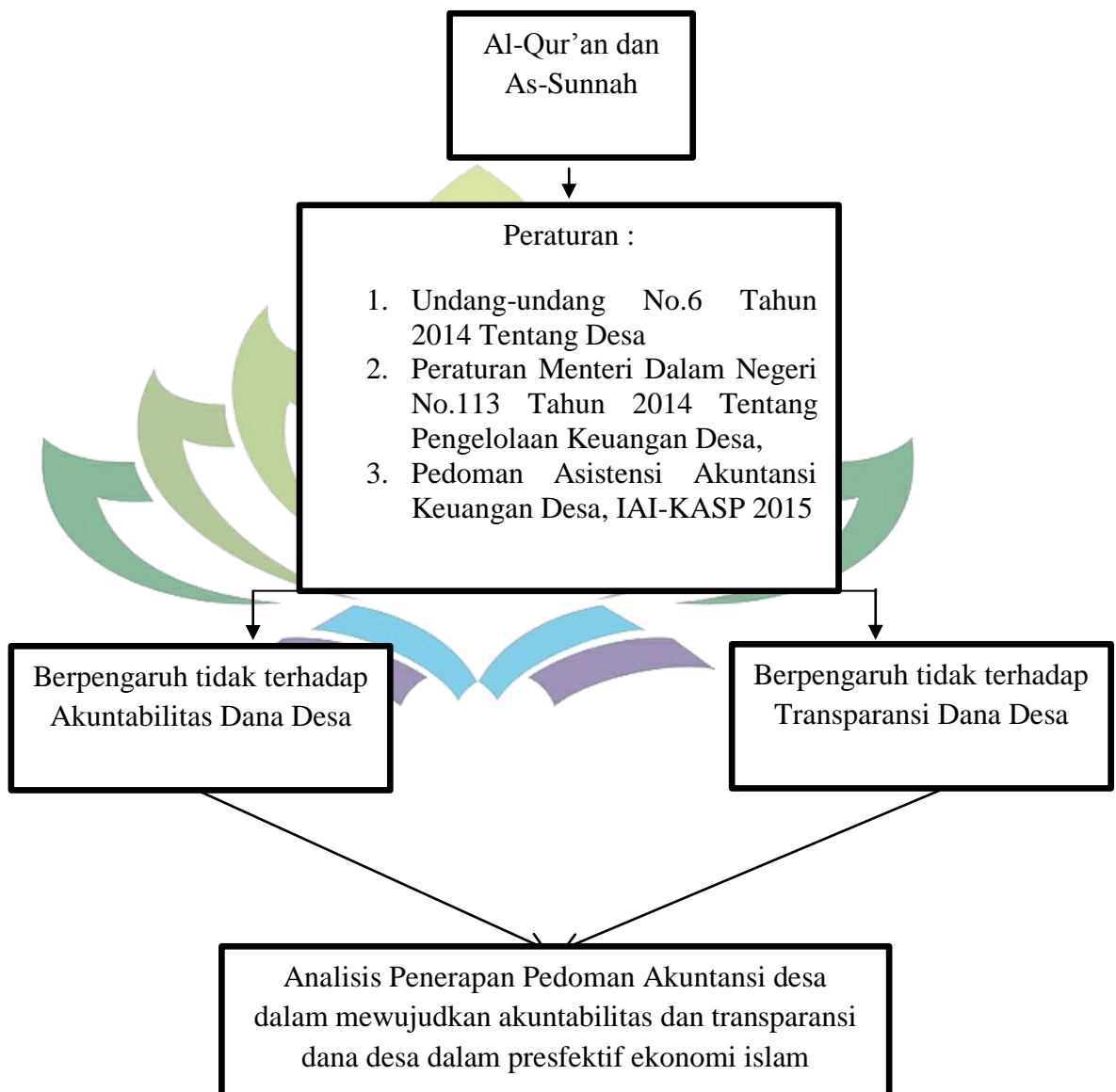


⁶⁶Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia, "Analisis Transparansi DaAkuntabilitas Pengelolaan KeMuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis", *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314

K. Kerangka Berfikir

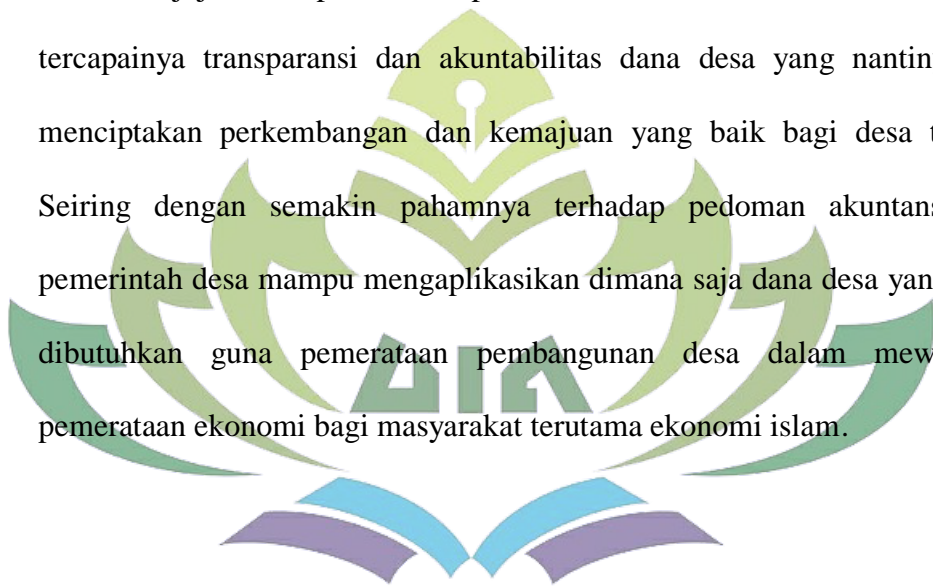
Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Fikir



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variable yang diteliti. Landasan berfikir diuraikan berlandaskan Al-quran, dan undang-undang sebagai pedoman.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam sebuah pencatatan mengharuskan sebuah kejujuran Implementasi pedoman akuntansi desa akan mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas dana desa yang nantinya akan menciptakan perkembangan dan kemajuan yang baik bagi desa tersebut. Seiring dengan semakin pahamnya terhadap pedoman akuntansi desa, pemerintah desa mampu mengaplikasikan dimana saja dana desa yang paling dibutuhkan guna pemerataan pembangunan desa dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat terutama ekonomi islam.



Daftar Pustaka

- Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Yeney Widya Prihatiningtias, “Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik” Universitas Brawijaya, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10 Nomor 1, April 2019.
- Arifin, Zaenal dan Tasai, Amran. *Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2006).
- Buku Saku Dana Desa, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, November 2017.
- Dedy Aries Poae David P. E. Saerang, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013*
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005)
- Eni Dwi Susliyanti, Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017*.
- Fatimah Azmi Nainggolan, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi reassert jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983).
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011).
- Herwanda Pratama, “KPK Beberkan 25 Provinsi Terkorup, Lampung Urutan Nomor Berapa ya?” kupastuntas.co, diunduh pada tanggal 6 januari 2020.
- <http://www.keuandangesa.com/2017/04/akuntansi-desa-keuangan-desa-dan-pengelolaan-keuangan-desa/> , diakses pada 24.01, rabu, 13 Desember 2019.
- <https://www.jogloabang.com/desa/tahapan-pencairan-dana-desa-2018-dalam-permenkeupmk-225pmk072017> Diakses pada tanggal 5 November 2019.

- Husman, Husein. *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumiaksara, 1996)
- IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, IAI-KASP : 2015.
- Inten Meutia Liliana, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Universitas Sriwijaya, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2017.
- Jamhari Ismanto, Korupsi, Mantan Kepala Pekon di Tanggamus Divonis 3 Tahun Penjara, WARTA9.COM, diunduh pada tanggal 6 januari 2020.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar maju, 2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-Line), tersedia di : <http://kbbi.kemedikbud.go.id/entri/pengaruh> diakses pada (9Desember 2019).
- Kountur, Rony. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara 2005).
- Kupas tuntas.co, korupsi dana desa Rp.500 juta, oknum kepala pekon jadi tersangka, terancam 20 tahun penjara, diakses pada 23 Desember 2019.
- Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017).
- Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis, *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314.
- Muindro Renyowijoyo (ed.3), *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non-Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Mustazir Ramli, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe”, Pemerintah Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 10 (1), April 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karay, 2011).
- Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani, “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.